



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RUDHY ANDI LOLO
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 902677

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.083.516.600**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 580 m2/274 m2 di KAB / KOTA TANA TORAJA, HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 1.287.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
3. Tanah Seluas 1.016 m2 di KAB / KOTA TANA TORAJA, WARISAN Rp. 27.432.000
4. Tanah Seluas 1.115 m2 di KAB / KOTA TANA TORAJA, WARISAN Rp. 28.864.000
5. Tanah Seluas 4.988 m2 di KAB / KOTA TANA TORAJA, WARISAN Rp. 12.220.600
6. Tanah Seluas 1.218 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, LAINNYA Rp. 1.218.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **514.500.000**

1. MOBIL, CHEVROLET CAPTIVA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, CHEVROLET COLORADO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000



4. MOTOR, KAWASAKI KLX 140 CC TRAIL Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. MOTOR, HONDA SM SOLO Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
6. MOBIL, JEEP CHRYSLER WILLY UNIVERSAL CJ 7 Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	563.355.080
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	714.389.583
F. HARTA LAINNYA	Rp.	280.310.487
Sub Total	Rp.	5.156.071.750
III. HUTANG	Rp.	593.677.339
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.562.394.411

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.